

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

KARTIKA SEPTIARY PRATIWI MUSA^{1,2}
ERWIN SARASWATI
ROEKHUDIN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ABSTRACT

This research aims to test corporate governance and earning management to corporate social responsibility disclosure. Sample on this research are 62 manufacturing companies and is family company that chosen by purposive sampling method. According to the analysis result, this research shows that earning management has positive and significant impact to corporate social responsibility disclosure and corporate governance that proxied with board of commissioner stated that there is positive relation on corporate social responsibility disclosure, on independent commissioner proportion doesn't affect significantly to corporate social responsibility disclosure, and on audit committee has significant impact on corporate social responsibility disclosure.

Keywords: *Corporate Governance, Earning Management, Corporate Social Responsibility Disclosure*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Sampel pada penelitian ini sejumlah 62 perusahaan manufaktur dan merupakan perusahaan keluarga yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini membuktikan bahwa manajemen laba signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan yang diproksi dengan ukuran dewan komisaris menyatakan ada hubungan positif dalam pengungkapan tanggung jawab sosial, pada proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dan pada komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Kata-kata Kunci: *Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Laba, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial*

¹ *Correspondence Author*

² *email: kartika.septiary@gmail.com*

Article Info:

Received 21 July 2020 | Revised 03 October 2020 | Accepted 26 October 2020

1. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan tentunya memiliki tanggung jawab bagi pemangku kepentingannya, baik itu dari pihak internal maupun pihak eksternal. Tanggung jawab yang dilakukan perusahaan ini merupakan tanggung jawab sosial dengan melihat seberapa besar kesadaran perusahaan mengenai bagaimana keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat (Madura, 2009). Elkington (1998) mengemukakan konsep CSR dalam fokus *triple bottom line*, yang mempersatukan kaidah ekonomi, sosial dan lingkungan dalam satu pemahaman yang terintegrasi pada tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan (*profit*), tetapi memiliki kepedulian terhadap lingkungan (*planet*), dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Tanggung jawab perusahaan tidak hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* dan *bondholder* saja, tetapi *stakeholders* lainnya yang berkepentingan dengan keberadaan perusahaan. Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan keterlibatan masyarakat, dampak lingkungan, kebijakan pelanggan, hubungan dengan pekerja, hak kemanusiaan, kegiatan bisnis pada bidang yang menjadi kontroversi, hubungan dengan pemasok, dan tata kelola perusahaan yang lebih baik (Prior *et al.*, 2008).

Contoh kasus perusahaan PT. Freeport yaitu Freeport McMoran Inc pada tahun 2017. Kisruh antara PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah telah memicu kejatuhan harga saham perusahaan tambang asal Amerika, Freeport McMoran Inc. Harga saham Freeport McMoran pada perdagangan 22 Februari 2017 ditutup turun 2,83 persen menjadi 13,37 sen Dolar Amerika Serikat per saham. Ini merupakan penurunan yang keenam kalinya sejak 14 Februari 2017. Alhasil, sepanjang Februari 2017, harga saham perusahaan induk PT. Freeport Indonesia ini telah jatuh 17,35 persen dari posisi akhir Januari di posisi 16,65 sen Dolar AS.

Perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial akan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, tetapi perilaku oportunistik manajemen laba dapat merugikan kepentingan *stakeholders*. Manajer yang melakukan manajemen laba akan menggunakan praktik etis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengamankan posisinya dan tetap memperoleh dukungan dari *stakeholders* (Chih *et al.*, 2008). Selain itu beberapa regulasi yang mendorong kewajiban pelaporan CSR perusahaan juga turut memberikan intensif bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Oleh karena itu diperlukan keterpaduan mekanisme *corporate governance* yang efektif dengan strategi CSR perusahaan untuk dapat menjamin tujuan CSR sebenarnya.

Penelitian ini dilakukan karena adanya variasi hasil dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mingzhi Liu, Yulin Shi, Craig Wilson, Zhenyu Wu (2017) yang berjudul "*Does family involvement explain why corporate social responsibility affects earnings management?*" pada perusahaan di Kanada. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keterlibatan keluarga dalam kepemilikan, manajemen, atau tata kelola bisnis mempengaruhi keterlibatan dalam manajemen laba baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Praktik manajemen laba lebih tinggi pada perusahaan keluarga daripada non-keluarga. Hal ini dikarenakan kurangnya kontrol, sehingga perusahaan keluarga dapat mengambil alih kekayaan investor minoritas untuk

meningkatkan keuntungan individu. Penelitian Wang (2006) dengan mengelompokkan perusahaan keluarga dan non-keluarga menunjukkan bahwa adanya hubungan antara struktur kepemilikan keluarga dengan manajemen laba.

2. LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Principal* adalah pemegang saham atau investor, dan yang dimaksud *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Ketidakeimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*).

Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Dalam bukunya Freeman (1985) menyatakan bahwa *stakeholder theory* dipandang dari segi bagaimana organisasi dapat berhasil dalam lingkungan bisnis sekarang dan di masa depan yaitu dengan memperhitungkan semua kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi, atau yang dapat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Donaldson dan Preston (1995) menyatakan bahwa *stakeholder* perusahaan tidak hanya *shareholder* saja namun juga terdapat kelompok lainnya yaitu pelanggan, pemasok, karyawan, kreditor, politisi, pemerintah, dan masyarakat.

Menurut Pirsch *et al.* (2007) *Stakeholder Theory* merupakan keberlanjutan dan kesuksesan organisasi bergantung pada kemampuan organisasi untuk dapat memenuhi aspek ekonomi dan non-ekonomi, dengan cara memuaskan kepentingan *stakeholder* yang bermacam-macam. Mitchell *et al.*, (1997) mengatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan juga bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Perusahaan yang melakukan investasi dalam aktivitas CSR akan dapat membantu perusahaan dalam memuaskan kepentingan *stakeholder*-nya Pirsch *et al.* (2007); Ronald *et al* (2019). Donaldson dan Preston (1995) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi antara perusahaan dengan *stakeholder*. Yuliana *et al.* (2008) mengatakan bahwa fokus utama dalam perusahaan saat ini yaitu

bagaimana perusahaan memonitor dan merespon kebutuhan para *stakeholder*-nya melalui kegiatan bisnis perusahaan.

Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesia (2002) merumuskan *corporate governance* sebagai sistem tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak berkepentingan (*stakeholders*). OECD melihat *Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang mana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sedangkan menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *Corporate Governance* adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Manajemen Laba

Menurut Healy dan Wahlen (1998) praktik manajemen laba merupakan suatu kreativitas manajemen dalam melakukan laporan keuangan dan mengatur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan memberi kesan tertentu untuk mempengaruhi tindakan para pemakai laporan keuangan. Scott (2012: 351), membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak uang, dan *political cost* (*Opportunistic Earnings Management*). Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting* (*Efficient Earning Management*), di mana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Schipper (1989) mengartikan manajemen laba sebagai "*disclosure management in the sense of purposeful intervention in the external reporting process with intent of obtaining some private gain.*" Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba merupakan intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan kepada pihak eksternal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Healy dan Wahlen (1998), menyatakan bahwa definisi manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan *judgement*. Kedua, tujuan manajemen laba untuk menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini muncul ketika manajemen memiliki akses terhadap informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kotler dan Lee (2005) memberikan definisi CSR sebagai berikut; "*Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practice and contributions of corporate resources*". Menurut definisi tersebut, elemen kunci dari CSR adalah kata *discretionary*. Terdapat pengaruh terhadap kinerja perusahaan dari partisipasi terhadap tanggung jawab

sosial, di antaranya adalah meningkatkan penjualan dan *market share*, menguatkan posisi merk, menurunkan biaya operasional, dan lain sebagainya. *European Commission* seperti dikutip Darwin (2008) mendefinisikan CSR sebagai “*a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis*”. Sedangkan menurut CSR Asia seperti dikutip Darwin (2008) definisi CSR sebagai berikut; *CSR is a company's commitment to operating in an economically, socially and environmentally sustainable manner whilst balancing the interests of diverse stakeholders*.

Definisi tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa CSR pada dasarnya adalah komitmen perusahaan terhadap tiga (3) elemen yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Definisi CSR dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang disampaikan *European Commission* dan CSR Asia. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Haniffa dkk., 2005). Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya dan selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Sayekti dan Wondabio, 2007).

Hipotesis Penelitian

- H1a: Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*
- H1b: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*
- H1c: Proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*
- H2: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *positivistic* berupa *explanatory research* melalui *hypotheses testing* yang menjelaskan fenomena hubungan antarvariabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel dengan bantuan analisis data melalui prosedur statistik untuk mengolah angka-angka dari hasil penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014-2017. Penentuan sampel

dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan penetapan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Penentuan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017	146
2.	Perusahaan manufaktur periode 2014-2017 yang tidak berturut-turut terdaftar di BEI pada periode pengamatan	(2)
3.	Perusahaan manufaktur yang bukan merupakan <i>family firm</i>	(79)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laporan keuangan tahunan lengkap periode 2014-2017	(3)
	Sampel yang digunakan dalam penelitian	62
	Jumlah data (62x4)	248

Definisi Operasional Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan CSR dalam penelitian ini diproksikan dengan indeks pengungkapan CSR (ICSR) berdasarkan *Global Reporting Initiatives* (GRI) yang diperoleh dari website www.globalreporting.org. Indikator GRI meliputi *economic* (9 items), *environment* (30 items) *labor practices* (14 items), *human rights* (9 items), *society* (8 items), dan *product responsibility* (9 items). Total items pengungkapan CSR menurut GRI adalah 79, sebagaimana diungkapkan pada *checklist* pengungkapan CSR pada lampiran 1. Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Indeks pengungkapan CSR (ICSR) untuk setiap perusahaan dihitung sebagai berikut (Haniffa dan Cooke, 2002):

$$CSRI = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Di mana:

CSRI_j: Indeks pengungkapan perusahaan j

n_j: Jumlah item pengungkapan untuk perusahaan j, n_j = 79

X_{ij}: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan.

Dengan demikian, 0 < ICSR_j < 1

Tata Kelola Perusahaan

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *Corporate Governance* adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dewan Komisaris

Dewan komisaris didefinisikan sebagai dewan manajemen yang berfungsi sebagai pengelola dan perwakilan perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris (FCGI, 2001:4). Dewan direksi merupakan manajemen yang bertanggung jawab mengelola dan mewakili perusahaan di bawah

pengawasan dan pengarahan dewan komisaris. Anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh dewan komisaris. Perusahaan dengan jumlah dewan direksi 1 sampai 7 orang diperkirakan optimal dalam mengontrol manajemen.

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan. Kriteria tentang komisaris independen: (1) Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan. (2) Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu. (3) Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut. (4) Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut. (5) Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut. (6) Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuan sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan. Proporsi dewan komisaris Independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi proses penyusunan dan pelaporan keuangan. Komite audit harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga kualitas laporan keuangan tersebut dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik komite audit. Semakin besar jumlah komite audit yang ada pada suatu perusahaan maka dapat meningkatkan *corporate governance*. Hasil kerja komite audit direfleksikan dalam suatu laporan komite yang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan dikotomi dengan nilai 1 jika terdapat laporan komite audit dalam laporan perusahaan, dan 0 jika tidak terdapat laporan komite audit dalam laporan tahunan perusahaan.

Manajemen Laba

Menurut Roychowdhury (2006) manajemen laba riil dapat dideteksi melalui 3 hal yaitu arus kas operasi, biaya produksi dan biaya diskresioner. Berikut merupakan penjabaran ketiga indikator tersebut:

1. Arus Kas Operasi

Untuk menghitung tingkat arus kas operasional, menggunakan rumus dari Roychowdhury (2006) yakni sebagai berikut:

$$\frac{CFO_{it}}{Assets_{i,t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + \alpha_2 \frac{Sales_{it}}{Assets_{i,t-1}} + \alpha_3 \frac{\Delta Sales_{it}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$CFO_{i,t}$ = Arus kas dari kegiatan operasi pada tahun t

$Assets_{i,t-1}$ = Total aset pada tahun t-1

$Sales_{i,t}$ = Penjualan bersih pada tahun t

$\Delta Sales_{i,t}$ = Penjualan bersih pada tahun t dikurangi penjualan bersih pada tahun t-1

$\varepsilon_{i,t}$ = Arus kas dari kegiatan operasi abnormal pada tahun t (Abn_CFO)

2. Biaya Produksi

Penelitian sebelumnya seperti Roychowdhury (2006), Cohen *et al.*, (2008), Badertscher (2011) dan Zang (2012) mendefinisikan biaya produksi sebagai penjumlahan dari *cost of good sold* (COGS) dan perubahan persediaan selama setahun, maka untuk menghitung tingkat biaya produksi adalah sebagai berikut:

$$\frac{Prod_{it}}{Assets_{i,t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + \alpha_2 \frac{Sales_{it}}{Assets_{i,t-1}} + \alpha_3 \frac{\Delta Sales_{it}}{Assets_{i,t-1}} + \alpha_4 \frac{\Delta Sales_{it-1}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$Prod_{i,t}$ = Biaya produksi pada tahun t

$\varepsilon_{i,t}$ = Biaya produksi abnormal (Abn_PROD)

3. Biaya Diskresioner

Biaya diskresioner terdiri atas biaya iklan, biaya riset dan pengembangan, biaya penjualan, serta biaya administrasi dan umum. Konsisten dengan penelitian Roychowdhury (2006), Cohen *et al.*, (2008), Badertscher (2011) dan Zang (2012), maka biaya diskresioner dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{DiscExp_{it}}{Assets_{i,t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \frac{1}{Assets_{i,t-1}} + \alpha_2 \frac{Sales_{it}}{Assets_{i,t-1}} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$DiscExp_{i,t}$ = Beban diskresioner pada tahun t (penjumlahan beban iklan; dan beban penjualan, umum dan administrasi).

$\varepsilon_{i,t}$ = Abnormal biaya diskresioner (Abn_DISEXP)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu data penelitian. Statistik deskriptif suatu penelitian dapat dilihat melalui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Hasil dari pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
CSR	248	0,62	1,83	1,18	0,213
Ukuran Dewan Komisaris	248	2,00	9,00	4,40	1,76
Dewan komisaris Independen	248	0,33	0,75	0,55	0,11
Komite Audit Independen	248	0,33	0,75	0,61	0,10
EM	248	7,62	8,98	8,5129	0,13398
Profitabilitas	248	0,18	43,83	14,82	9,92
Ukuran Perusahaan	248	24,90	33,63	29,70	2,25

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 2 dapat diketahui sejumlah informasi yaitu total observasi data dalam penelitian ini adalah 248 di setiap variabelnya. variabel *corporate social responsibility* memiliki nilai minimum sebesar 0,621 dan nilai maksimum 1,833, sedangkan nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 1,181 dengan standar deviasi sebesar 0,213. Ukuran dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum 9,00 sedangkan nilai rata-rata 4,40 dengan standar deviasi sebesar 1,78. Dewan komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,33 dan nilai maksimum 0,75 sedangkan nilai rata-rata 0,55 dengan standar deviasi sebesar 0,11. Komite audit independen memiliki nilai minimum sebesar 0,33 dan nilai maksimum 0,75 sedangkan nilai rata-rata 0,61 dengan standar deviasi sebesar 0,10. Variabel manajemen laba memiliki nilai rata-rata 8,5308 dan berada di atas standar deviasinya yaitu 0,13398. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data kecil. Nilai rata-rata perusahaan bernilai positif, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan diindikasikan melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba yang dilaporkan. Nilai mediannya adalah 8,5129. Nilai terendah dari *earnings management* adalah sebesar 7,62 dan nilai tertingginya sebesar 8,98. Profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,18 dan nilai maksimum 43,83 sedangkan nilai rata-rata 14,82 dengan standar deviasi sebesar 9,92. Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 24,90 dan nilai

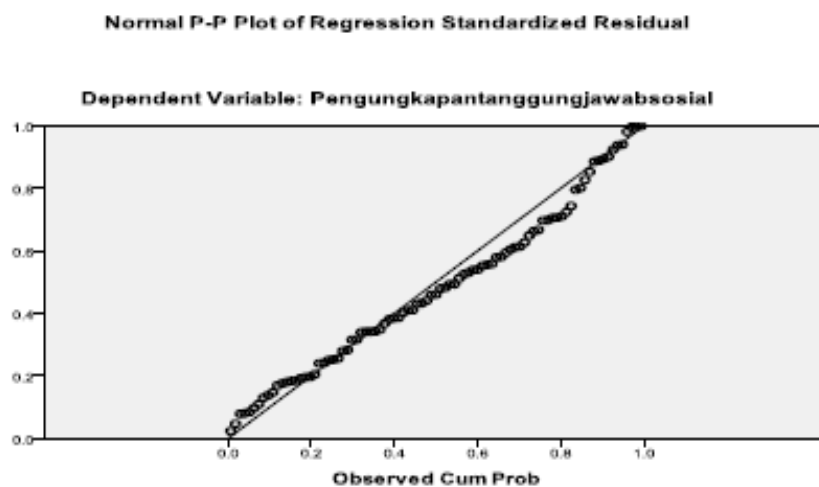
maksimum 33,63 sedangkan nilai rata-rata 29,70 dengan standar deviasi sebesar 2,25. Keadaan data yang variatif ini mengakibatkan keterbatasan analisis yang dapat dilakukan terhadap rata-rata. Rata-rata setiap variabel menjadi kurang valid digunakan sebagai dasar analisis. Fungsi analisis deskriptif bukan memberikan kesimpulan hasil penelitian namun hanya memberikan gambaran awal data penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual yang diperoleh dari model mengikuti distribusi normal atau tidak. Hasil pengujian menunjukkan residual berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik normal PP Plot pada gambar 1.

Gambar 1
Grafik Normal PP Plot



Dari gambar dapat dilihat titik-titik berada disekitar garis diagonal. Titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan residual berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui suatu model regresi terdapat permasalahan korelasi yang tinggi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. masalah multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Suatu model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas bila *tolerance value* > 0,1 atau nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

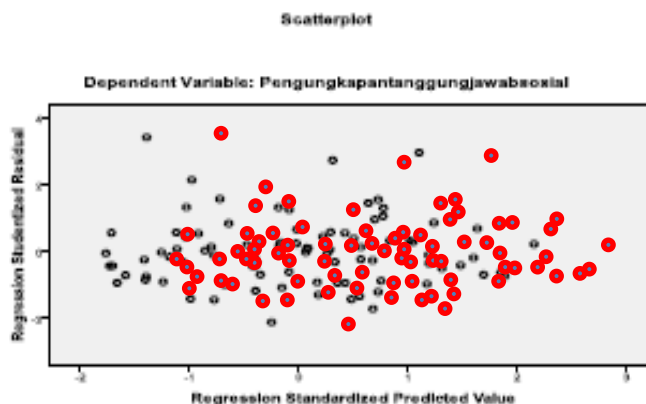
Variabel	VIF	Tolerance	Asumsi Multikolinearitas
Manajemen Laba	1,081	0,925	Tidak terjadi multikolinearitas
Komisaris Independen	1,096	0,912	Tidak terjadi multikolinearitas
Dewan Komisaris	1,059	0,945	Tidak terjadi multikolinearitas
Komite Audit	1,016	0,985	Tidak terjadi multikolinearitas

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini memiliki model regresi yang terbebas dari multikolinearitas. Hal ini karena semua variabel memiliki nilai VIF dibawah 10, dan nilai toleransi diatas 0,1.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model yang baik adalah yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan *scatterplot*. Hasil uji heteroskedastisitas persamaan regresi disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka nol. Titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin Watson* yaitu dengan membandingkan nilai *Durbin Watson* hitung (d) dengan nilai *Durbin Watson* tabel yaitu batas lebih tinggi (*upper bond* atau d_u) dan batas lebih rendah (*lower bond* atau d_l). Untuk mendeteksi hal tersebut dapat dilihat melalui besaran angka *Durbin Watson* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika $1,7887 < DW < 2,2113$ maka tidak terjadi autokorelasi
- b. Jika $DW < 1,7887$ atau $DW > 2,2113$ maka ada autokorelasi

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil dari uji autokorelasi model penelitian. Nilai- nilai yang dihasilkan dari output uji autokorelasi seperti berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Du	4-dU	Durbin-Watson	Kesimpulan
1,7887	2,2113	1,906	Tidak terjadi autokorelasi

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Berdasarkan hasil pengujian variabel Ukuran Dewan Komisaris (UDK) terhadap tingkat pengungkapan CSR, dapat diketahui bahwa adanya hubungan yang signifikan dan positif antara variabel ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan CSR. Sehingga hipotesis bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif dengan luas pengungkapan CSR dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Sulastini (2007) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan pengungkapan CSR. Artinya semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan akan semakin luas. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Jadi semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan semakin efektif.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Hasil uji regresi linear berganda untuk CSR menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan meskipun memiliki arah yang positif. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis bahwa ada hubungan positif antara proporsi komisaris independen dan pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penemuan Said *et.al.*, (2009) yang menyatakan tidak menemukan hubungan yang signifikan antara dewan komisaris independen dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti semakin besar proporsi komisaris independen diharapkan menjadikan pengungkapan CSR menjadi lebih luas. Untuk mencapai transparansi dan pengungkapan CSR yang lebih luas, maka pemilihan komisaris independen harus memperhatikan kemampuan, dan integritasnya, sehingga dapat melakukan fungsi *monitoring*, pengendalian, dan mampu memberikan arahan kepada manajemen dengan baik demi kepentingan perusahaan. Namun apabila perusahaan telah memperoleh legitimasi yang kuat baik dari masyarakat maupun investor, fungsi komisaris independen menjadi tidak efektif. Dengan demikian perusahaan akan lebih cenderung berpendapat tidak mengungkapkan informasi yang lebih luas.

Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Hasil uji regresi linear berganda untuk CSR menunjukkan bahwa variabel Ukuran Komite Audit (KMA) memiliki hubungan arah positif dan signifikan. Artinya variabel ukuran komite audit memiliki hubungan positif dan signifikan dengan luas pengungkapan CSR perusahaan sektor finansial di Indonesia. Dengan demikian hipotesis bahwa proporsi komite audit independen berhubungan positif dengan luas pengungkapan CSR dapat diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Said *et.al.*, (2009) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara ukuran komite audit dengan tingkat pengungkapan sukarela. Tanggung jawab komite audit adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan. Di Indonesia keanggotaan komite audit diatur berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa komite audit yang dimiliki minimal terdiri dari 1 orang komisaris independen dan 2 orang anggota lainnya berasal dari luar emiten (independen). Semakin banyak komite audit independen maka pengawasan dan pemeriksaan terhadap mekanisme manajemen perusahaan akan lebih efektif, sehingga perusahaan akan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya lebih luas.

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Hasil penelitian dari serangkaian pengujian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Praktik Manajemen Laba untuk aktivitas produksi. Hal ini karena perusahaan melakukan produksi besar-besaran dengan tujuan untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Cohen dan Zarowin (2010), perusahaan yang melakukan *overproduction* akan berdampak pada timbulnya biaya produksi abnormal yang positif. Semakin tinggi nilai biaya produksi abnormal maka laba yang dilaporkan akan semakin tinggi. Sehingga, perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya atau mempertahankan kinerja sebelumnya yang sudah baik. Hal tersebut dilakukan manajer untuk menghindari penurunan laba perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel perusahaan manufaktur yang memiliki struktur kepemilikan keluarga.

Dengan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga di Indonesia cenderung melakukan praktik manajemen laba riil melalui aktivitas produksi dan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk menutupi perilaku oportunistik, di mana perusahaan akan berusaha memperbaiki citra dirinya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, perusahaan akan lebih banyak mengungkapkan informasi kegiatan operasionalnya. Pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan lingkungan sekitar.

Perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga memiliki kontrol yang tinggi terhadap aktivitas perusahaan. Ini dikarenakan dalam perusahaan pihak direksi dan manajer merupakan masih terdapat hubungan keluarga. Konflik yang terjadi bukan antara pengelola (manajer) dengan pemilik (pemegang saham), melainkan antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Untuk itu, yang berlaku pada kondisi seperti ini bukan lagi *Agency Theory* tipe I, melainkan *Agency Theory* tipe II. Adanya kondisi tersebut mendorong kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba. Hal ini karena pihak keluarga memiliki kontrol penuh terhadap setiap keputusan yang diambil perusahaan. Keputusan tersebut sering kali merugikan pihak minoritas/non-pengendali. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian Kazemiana dan Sanusi (2015) dan Lisboa (2017) yang menunjukkan bahwa bisnis keluarga berpengaruh terhadap manajemen laba. Selain itu, penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Cohen dan Zarowin (2010), Seperti yang dikemukakan oleh Burgstahler dan Dichev (1997) yang menyatakan bahwa motivasi manajer melakukan manajemen laba ada: 1) untuk menghindari pelaporan penurunan laba, 2) untuk menghindari pelaporan kerugian, 3) untuk menghindari kegagalan memenuhi peramalan laba analis. Hal ini menunjukkan semakin banyak pengungkapan yang dilakukan perusahaan justru dapat meningkatkan praktik manajemen laba oleh perusahaan. Oleh karena itu, *earnings management* yang dilakukan perusahaan adalah sebagai penyeimbang dari pengungkapan aktivitas CSR agar laba yang dilaporkan pada *stakeholder* tetap tinggi dan perusahaan mendapatkan kepercayaan *shareholder*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola dan manajemen laba dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan pada perusahaan manufaktur dan merupakan perusahaan keluarga. Dasar teori yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*), teori *stakeholder* dan teori legitimasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 62 perusahaan manufaktur dan merupakan perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa manajemen laba signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Prior *et al.*, (2008) bahwa terdapat pengaruh positif dari praktik manajemen laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini memberikan dukungan teori bahwa tanggung jawab sosial

perusahaan merupakan bagian dari strategi bertahan bagi perilaku oportunistik manajerial untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholders*.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa interaksi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini berarti seberapapun besarnya komposisi komisaris independen, tidak akan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dewan direksi tidak terbukti dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi sebagai bagian dari praktik *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini mengindikasikan keberadaan dewan direksi sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* belum dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Interaksi komite audit dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi komite audit terbukti dapat berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badertscher, B. (2011). *Overvaluation and the choice of alternative earnings management mechanisms. The Accounting Review.*
- Burgstahler, D. and I. D. Dichev. (1997). *Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses. Journal of Accounting and Economics. Vol 24, pp. 99-126.*
- Chih, et al. (2008). *Corporate Social Responsibility, Investor Protection, and Earnings Management: Some International Evidence. Journal of Business Ethics. pp 79:179-198.*
- Cohen, D., A. Dey, and T. LYS. (2008). *Real and Accrual Based Earnings Management in the Pre and Post Sarbanes Oxley periods. The Accounting Review. Vol. 83, pp. 757-787.*
- Cohen, D. A, Zarowin, P. (2010). *Accrual Based and Real Earnings Management Activities Around Seasoned Equity Offerings. Journal Of Accounting and Economics. Vol. 50 (1), pp. 2-19.*
- Elkington, John (1998), *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business, Gabriola Island, BC: New Society Publishers*
- Kazemian, S and Z. M. Sanusi. (2015). *Earnings Management and Ownership Structure.*
- Lisboa, Ines. (2017). *Impact of financial crisis and family control on earning management of Portuguese listed firms.*
- Madura, Jeff. (2009). *International Corporate Finance 9th Edition, South Western.*
- Prior, D. et al. (2008). *Are Socially Responsible Managers Really Ethical?. Exploring the Relationship Between Earnings Management and Corporate Social Responsibility. Journal Compilation Vol 16 No 3, May.*
- Ronald, S., Ng, S., & Daromes, F. E. (2019). Corporate Social Responsibility as Economic Mechanism for Creating Firm Value. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 3(1), 22-36.*
- Roychowdhury, S. (2006). *Earnings Management through Real Activities Manipulation. Journal of Accounting and Economics 42. pp.335-370.*
- Sembiring, Eddy Rismanda. (2003). Kinerja Keuangan, *Political Visibility, Ketergantungan Pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi VI*

- Sulastini, R. (2007). pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *Social disclosure* perusahaan manufaktur yang telah *go public*. Skripsi. Semarang: Universitas negeri Semarang.
- Wang, D. (2006). Pendiri kepemilikan keluarga dan kualitas laba. *Jurnal Akuntansi Penelitian*, 44 (3), 619-656.
- Zang, A. (2012). *Evidence on the Trade-Off between Real Activities Manipulation and Accrual Based Earnings Management*. *The Accounting Review*. Vol. 87 (2), pp. 675-703.